



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIT KERJA** : POLITEKNIK NEGERI BATAM

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUHAMMAD ZAENUDDIN
2. Jabatan : PEMBANTU DIREKTUR BIDANG KEMAHASISWAAN, KERJA SAMA DAN ALUMNI
3. NHK : 712605

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.060.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m2/38 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/38 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
3. Tanah Seluas 3000 m2 di KAB / KOTA PATI, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 3.500.000

1. MOTOR, YAMAHA 5 TL MIO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 28.891.596

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.092.391.596

**III. HUTANG** Rp. 365.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 727.391.596

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



memenuhi kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.